

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan indikator pada Implementasi Kebijakan Penanganan Gizi Buruk Pada Balita Di Desa Banteran Kecamatan Sumbang Tahun 2022 dapat dilihat dari beberapa aspek seperti komunikasi, sumber daya, sikap (disposisi), dan struktur birokrasi. Dalam implementasi kebijakan penanganan gizi buruk pada balita di Desa Banteran masih kurang optimal dalam pelaksanaannya karena dalam pemberian makanan tambahan pemulihan yang diberikan baru dapat memberikan PMT dalam kurun waktu satu bulan sekali. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan antara lain:

Pada aspek komunikasi berdasarkan kesimpulan dari pembahasan bahwa untuk menganalisis komunikasi yaitu dengan melihat komponen yang ada di dalamnya yang pertama yaitu dari transmisi komunikasi kebijakan program pemberian makanan tambahan pemulihan untuk penanggulangan gizi buruk pada balita dan yang kedua dilihat dari kejelasan komunikasi dalam kebijakan program pemberian makanan tambahan pemulihan untuk penanggulangan gizi buruk, dalam segi transmisi komunikasi pelaksanaan program PMT pemulihan di Desa Banteran Kecamatan Sumbang salah satunya yaitu kegiatan sosialisasi kepada ibu balita yang anak balitanya terkena gizi buruk yang dilaksanakan oleh ahli gizi Puskesmas 1 Sumbang yang bekerjasama dengan pemerintah desa, bidan desa dan kader posyandu, sudah terbilang berhasil. Jika dilihat dari segi kejelasan komunikasi sudah berjalan dengan baik dan terarah karena pihak pelaksana sudah memiliki pengetahuan tentang gizi buruk dan dapat memberikan kejelasan dalam berkomunikasi agar para ibu balita dapat mengikuti program pemberian makanan tambahan pemulihan.

Pada aspek sumber daya peneliti menemukan bahwa pelaksana program pemberian makanan tambahan pemulihan untuk balita yang terkena gizi buruk di Desa Banteran Kecamatan Sumbang secara keseluruhan dalam sub aspek sudah baik salah satunya yaitu dari sumber anggaran untuk program PMT pemulihan yang berasal dari dana desa yang masuk dalam APBDes yang diberikan oleh pemerintah desa, sehingga untuk kejelasan sumber anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan program PMT pemulihan sudah jelas, kemudian untuk kecukupan anggaran dalam program tersebut dapat dikatakan belum mencukupi karena masih kurang anggarannya.

Pada aspek sikap (disposisi) dari pemaparan yang ada di pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa melihat dari sub aspek sudah berjalan dengan semestinya, dibuktikan dengan adanya keseriusan dan dukungan penuh yang diberikan oleh pemerintah desa untuk mendukung program pemberian makanan tambahan pemulihan untuk balita yang terkena gizi buruk agar balita tersebut mendapatkan makanan tambahan yang tinggi protein untuk pemulihan gizi.

Pada aspek struktur birokrasi berdasarkan kesimpulan yang ada di pembahasan bahwa untuk menganalisis suatu evaluasi proses yaitu dengan cara melihat suatu komponen yang ada didalamnya seperti fregmentasi organisasi dan pengaruh struktur organisasi (SOP). Dalam pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT pemulihan) dan tatalaksana gizi buruk sudah jelas bahwa masing-masing sudah mempunyai SOP. Sedangkan untuk kejelasan pembagian tanggung jawab sudah sangat jelas karena para pelaksana program tersebut sudah melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab masing-masing.

Berdasarkan poin di atas maka kesimpulan yang dapat diambil dari implementasi kebijakan penanggulangan gizi buruk pada balita di Desa Banteran Kecamatan Sumbang yaitu program PMT pemulihan (pemberian makanan tambahan pemulihan) sejauh ini masih kurang optimal dikarenakan sumber anggaran yang masih sedikit.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Dalam sumber daya anggaran menjadi hal yang penting dalam pelaksanaan program pemberian makanan tambahan pemulihan untuk balita yang terkena gizi buruk di Desa Banteran Kecamatan Sumbang terutama untuk pembelian PMT. Maka dari itu dana desa APBDes untuk pembelian PMT pemulihan harus dialokasikan dan diperhitungkan dengan baik karena dapat meminimalisir kasus gizi buruk pada balita jika terlaksana dengan optimal.
2. Didalam pelaksanaan program pemberian makanan tambahan pemulihan (PMT pemulihan) untuk balita yang terkena gizi buruk harus menjunjung tinggi dalam sosialisasi, kerjasama dan koordinasi terutama untuk para pelaksana program, karena jika saat pelaksanaan sosialisasi, kerjasama, dan koordinasi sudah baik tidak akan ada kesalahan maupun miskomunikasi dalam melaksanakan program tersebut.
3. Didalam pelaksanaan program pemberian makanan tambahan pemulihan untuk balita yang terkena gizi buruk di Desa Banteran Kecamatan Sumbang untuk para pelaksana program tersebut pasti diisi oleh orang-orang yang memiliki kemampuan di bidangnya, akan tetapi untuk kader posyandu yang memahami tentang kesehatan gizi yang baik hanya dua orang perposyandu, untuk itu kedepannya dalam sosialisasi diharapkan semua kader posyandu mengikuti agar dapat memahami hal-hal tentang kesehatan gizi yang baik.
4. Program pemberian makanan tambahan pemulihan sangat membantu dalam memulihkan gizi anak balita yang terkena gizi buruk. Untuk PMT pemulihan diharapkan mempunyai anggaran yang cukup karena semestinya PMT pemulihan diberikan dalam kurun waktu 90 hari atau 3 bulan secara berturut-turut. Namun di Desa Banteran Kecamatan Sumbang program tersebut belum optimal karena baru dapat memberikan PMT 1 bulan sekali.